

MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PERAN KOMITE DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 (MODEL) LUBUKLINGGAU

Dian Setyowati

Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Lubuklinggau

Email: Dian Setyowati@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan komite sekolah untuk mengembangkan kebijakan, faktor pendukung dalam pengelolaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lubuklinggau. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan validasi data triangulasi dan kemudian kesimpulan. Produksi untuk penelitian ini diperlukan untuk mendukung komite sekolah utama yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala madrasah di MAN 1 sudah melakukan manajemen yang unggul untuk meningkatkan peran komite sekolah, hal ini dilandasi sikap kepala sekolah yang berani dan mampu meningkatkan peran komite. Pelaksanaan program kerja komite sekolah di MAN 1 Lubuklinggau telah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran komite sekolah dan peran serta aktif komite sekolah dalam penyelenggaraan program kerja sekolah.

Kata kunci: *Manajemen Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat*

Abstract

The purpose of this study is to explain the principal's management in improving school committees to develop policies, supporting factors in the management of Madrasah Aliyah Negeri 1 Lubuklinggau. This research is descriptive with qualitative approach, data collection from observation technique, interview and documentation, while data analysis using data reduction technique, data presentation and data validation triangulation and then conclusion. Production for this research is needed to support the main school committees involved in educational activities. The results of this study indicate that the head of madrasah in MAN 1 has done superior management to improve the role of school committee, it is based on the attitude of the brave principals and able to increase the role of the committee. Implementation of school committee work program in MAN 1 Lubuklinggau has been run effectively. This is marked by the understanding of school committee and headmaster committee on the task and role of the school committee and the active role of the school committee in organizing the school work program.

Keywords: *Key Management, School Committee Role, Supporting Factors, Inhibiting Factors*

Pendahuluan

Pengefektifan komite sekolah juga merupakan bagian dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. MBS merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan MBS dapat diidentifikasi: (1) adanya peningkatan otonomi atau kemandirian sekolah dalam mengelola sekolahnya; (2) adanya perubahan dalam sistem pengambilan keputusan ke arah pengambilan keputusan secara partisipatif, yang melibatkan semua komponen sekolah; (3) adanya peningkatan peran serta orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (4) adanya upaya dalam perbaikan praktik pembelajaran, menuju pembelajaran yang efektif dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah.

Dengan demikian, keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi MBS dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Selama ini di Indonesia telah diupayakan pelibatan masyarakat dalam 10 penyelenggaraan pendidikan, namun keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan dana untuk penyelenggaraan pendidikan atau sekedar untuk membantu serta menyediakan fasilitas belajar anak di rumah.

Sementara itu, keterlibatan orangtua siswa dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, evaluasi dan akuntabilitas program belum dapat terealisasikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang diidealkan oleh konsep MBS nampaknya merupakan upaya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan direalisasikan secara bertahap. Masih rendahnya kesadaran orangtua dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat pendidikan orangtua, faktor budaya dan sikap orangtua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, diduga akan menjadi kendala utama dalam upaya pelibatan orangtua dalam pendidikan anaknya di sekolah.

Sikap sebagian administrator sekolah dan guru, dan sikap iklim kerja yang tertutup juga menyebabkan rendahnya keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Erat kaitannya dengan implementasi MBS juga menyangkut peranan kepala sekolah, kewenangan yang diberikan kepada sekolah mengakibatkan kepala sekolah memiliki peranan yang krusial dan kuat dalam kebijakan pendidikan di sekolah.

Dengan adanya komite sekolah pengelolaan pendidikan di sekolah diharapkan bisa transparan, efektif, dan efisien. Selain itu efek akuntabilitas dan rentang pengawasan semakin pendek, pihak masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, realita di sekolah

peranan komite sekolah tersebut belum seperti yang diharapkan. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai pemberdayaan program kerja komite sekolah sehingga dapat diketahui efektifitas kinerja komite sekolah maupun faktor-faktor pendukung dan penghambat proses kerja komite.

Menurut observasi awal diketahui bahwa MAN 1 Lubuklinggau memiliki banyak prestasi yang telah dicapai, baik dari tingkat Kabupaten Provinsi maupun nasional. MAN 1 Lubuklinggau menjadi satu-satunya madrasah percontohan di Kota Lubuklinggau, selain itu juga, banyak mendapatkan prestasi di bidang akademik dan non akademik, khususnya di bawah pimpinan Bpk.Taslim, M.M, MAN 1 Lubuklinggau berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu tamatan atau calon tenaga kerja yang mempunyai pribadi yang mandiri, professional, berimtaq dan berbudaya lingkungan di era global. Secara akademis selama tiga tahun berturut-turut Tahun 2016 sampai dengan 2018 seluruh siswa 100% lulus pada ujian nasional. Keberhasilan ini tentunya tak lepas dari kemampuan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan peran komite di MAN 1 lubuklinggau ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan peran komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 (Model) Lubuklinggau ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan peran komite di MAN 1 Lubuklinggau?
3. Bagaimana Upaya mengatasi hambatan-hambatan komite sekolah MAN 1 Lubuklinggau dalam menjalankan tugas dan peranya?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk dapat merancang dan menyusun kebijakan Komite di MAN 1 (Model) Lubuklinggau .
- 2) Untuk menata tugas dengan menempatkan tugas itu pada tempat yang tepat dan memudahkan dalam menjalankan tugas masing-masing untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 (Model) Lubuklinggau Kota Lubuklinggau.

Metode Penelitian

Penelitian ini megunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan karena peneliti ingin memperoleh kualitatif berupa kata-kata lisan, tulisan, kegiatan, aktivitas, tindakan gambar foto, dan dokumen yang terkait yaitu manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan peran komite sekolah di madrasah aliyah negeri 1 lubuklinggau.

Landasan Teori

1. Manajemen Kepala Sekolah

Tak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahwa merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang berkerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja memenuhi persyaratan sebagi bidang ilmu pengetahuan, karena dipelajari dalam waktu kurung waktu yang lama dan memiliki serangkaian

teori yang perlu diuji dan dikembangkan dalam praktek manajerial pada lingkup organisasi.

Manajemen mempunyai peran besar dalam mendominasi potensi sekolah, manajemen yang dinamis, progresif dan responsive, akan membuka suasana baru, elemen merasa dihargai, ditempatkan pada posisinya dan mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing.¹

Manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain (*Management is getting done through other people*). Definisi tersebut kelihatannya masih belum lengkap, karena manajemen sebagai pengerak dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan.

Di samping itu, perlu juga dijelaskan bagaimana orang-orang lain itu mencapai tujuan melalui kerja sama. Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerja sama orang-orang lain”.²

2. Manajemen Komite Sekolah

Pentingnya manajemen komite sekolah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan untuk mencapai kualitas lembaga pendidikan atau pendidikan pesantren yang efektif. Manajemen yang baik merupakan hal yang esensial bagi semua sumber daya ada untuk dapat difungsikan dan sumber pengaruh secara maksimal untuk pencapaian tujuan organisasi pendidikan.³

Dalam organisasi berlangsung aktivitas manajerial yang mewujudkan usaha bersama dari sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Karena itu dalam proses manajemen dibuat perencanaan, ditetapkan pelaksanaan kegiatan, di bagi tugas, diberikan, diberikan tanggung jawab dan diawasi serta evaluasi hasil yang di capai.

Menurut pendapat Winardi (1990) manajemen merupakan proses dan hak terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Pembahasan

Manajemen mempunyai peran besar dalam mendinamisasi potensi sekolah, manajemen yang dinamis dan progresif akan membuka sarana baru, segar, dan penuh kekeluargaan, masing-masing elemen merasa dihargai, ditempatkan di posisinya, dan mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Didalam manajemen yang sudah di pakai oleh kepala madrasah, beliau sudah menerapkan konsep dasar atau langkah-langkah manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

¹ Jamal Ma'Mur, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah* (Wonosari: Diva Press Anggota IKAPI 2012) hlm.11

² Mulyono, *Manajemen Administrasi dan organisasi pendidikan*, (Jakarta: AR-Ruzz Media, 2008), hlm.15

³ Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum* cet. Ke-1 (Bandung : Remaja Rosda karya, 1990), hlm.33

Dengan menggunakan manajemen yang tepat sesuai prosedur maka manajemen yang digunakan kepala madrasah sangat mempengaruhi peran komite di sekolah.

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan tuntutan yang lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Tuntutan tersebut tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 41 Sekolah. Butir-butir ketentuan yang penting di dalam Kepmendiknas tersebut akhirnya juga diakomodasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan daerah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, telah meluncurkan beberapa program dan kegiatan dengan tujuan agar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Renstra Depdiknas 2004-2009, khususnya dalam pilar peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, disebutkan tentang tonggak kunci keberhasilan (key development milestone) pembangunan pendidikan dasar dan menengah adalah: (1) 50% Dewan Pendidikan telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, (2) 50% Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, dan (3) Dewan Pendidikan Nasional terbentuk pada tahun 2009.

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56, tercantum bahwa komite sekolah dan madrasah diberikan peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui: (1) nasihat; (2) pengarahan; (3) bantuan personalia, material, dan fasilitas; maupun (4) pengawasan pendidikan. Dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan pada bab di atas, kepengurusan komite sekolah telah mengikuti aturan dengan jumlah anggota minimum 11 orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang, dan untuk struktur organisasi seperti disarankan. Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite sekolah.

Paling banyak ada tiga orang wanita terwakili dalam komite sekolah, meskipun demikian bendaharawan adalah wanita. Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki. Sebagian besar anggota komite sekolah mempunyai minat menjadi anggota komite sekolah. Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah dan tidak melalui pemilihan.

Program-program yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah. Komite sekolah dengan semangat tinggi merinci perubahan-perubahan di sekolah di dalam empat bidang peningkatan pembelajaran, kesejahteraan guru, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik.

Oleh sebab itu harus benar-benar pengelolaan komite sekolah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1. Perencanaan

Perencanaan program kerja Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan harus berorientasi pada keempat perannya. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, seefektif dan seefisien mungkin. Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan, seperti: mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah; menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan; pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah; menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah; memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum k13, memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran; memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM); memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah, memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS. Perencanaan dalam hal sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti: mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholders di lingkungan sekolah; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu; memotivasi JMP,

bentuk kegiatan-kegiatan seperti: meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya; mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Perencanaan program kerja komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti: melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu; membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders pendidikan di sekitar sekolah; mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk: menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah; menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

Perencanaan sangat penting dilakukan, karena tanpa adanya rencana berarti tidak ada tujuan yang dicapai, adanya rencana tidak ada pedoman pelaksanaan, sehingga banyak pemborosan, dan rencana merupakan dasar pengendalian, kerana tanpa adanya rencana pengendalian tidak dapat dilakukan. Jika rencana program kerja Komite Sekolah sudah mencakup keempat peran tersebut di atas, maka dapat dikatakan perencanaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan sudah baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti, apakah dapat dilaksanakan sesuai rencana atau justru sebaliknya. Karena semua itu tergantung bagaimana Komite Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, dan lingkungan sosial ekonomi yang mendukungnya.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan tindakan penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, penugasan tanggung jawab tertentu, dan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pengorganisasian juga merupakan pengaturan kerja sama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi.

Dalam melaksanakan pengorganisasian, Komite Sekolah MAN 1 Lubuklinggau mengatur sumber daya manusia dan sumber daya finansial ke dalam pembagian kerja. Hal ini berarti proses pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan Komite Sekolah. Dalam proses

pengorganisasian ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengorganisasian, yaitu : pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dapat dilaksanakan oleh satu orang, dan pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan realisasi rencana program kerja dalam bentuk kegiatan yang nyata. Dalam melaksanakan perannya sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency dan mediator agency, komite sekolah dapat melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam tujuh fungsi komite sekolah yang dapat membantu peningkatan mutu di satuan pendidikan.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan JMP, Volume 2 Nomor 1, April 2013 masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam proses pelaksanaan program kerja, ketua Komite Sekolah MAN 1 Lubuklinggau bertindak sebagai pengarah dan pemberi motivasi agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan lancar. Pengarahan dalam proses pelaksanaan sangat penting, karena pengarahan yang dilakukan sebelum memulai bekerja, berguna untuk menekankan hal-hal yang perlu ditangani, urutan prioritas, prosedur kerja dan lainlainnya agar pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien. Pengarahan yang dilakukan selama melaksanakan tugas bagi orang-orang yang terlibat dimaksudkan untuk mengingatkan ataupun meluruskan apabila terjadi penyelewengan atau penyimpangan.

4. Evaluasi

Evaluasi program kerja Komite Sekolah MAN 1 Lubuklinggau dilakukan untuk menilai semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya suatu kegiatan Komite Sekolah dalam pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian dalam kegiatan Komite

Sekolah berikutnya. Evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi tentang seberapa jauh Komite Sekolah telah melaksanakan keempat perannya tersebut. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam merencanakan kegiatan yang akan datang. Dalam melaksanakan evaluasi program kerja Komite Sekolah harus dilakukan oleh seluruh pengurus Komite Sekolah, agar permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program kerja dapat diketahui. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, perbaikan dan pencarian solusi yang tepat dapat ditemukan dengan mudah. Pencarian solusi akan lebih mudah jika dilakukan bersamasama.

Walaupun demikian, dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kerjanya komite sekolah mengalami berbagai kendala. Kendala yang paling menonjol adalah usaha sekolah untuk mendanai program secara mandiri, terutama karena perencanaan dilakukan lebih dulu, dan kemudian dicarikan pendanaannya. Komite dan sekolah melaksanakan wiraswasta dalam hal ini dengan menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan dana. Dari keempat peran komite sekolah, peran yang dominan sering dianggap sebagai kriteria keefektifan komite sekolah yaitu dalam hal pengumpulan dana.

Kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite oleh sebagian besar dari responden. Sebagian besar responden mengharapkan komite sekolah yang ideal di masa depan mempunyai peran yang lebih besar daripada perannya sekarang. Banyak yang menganggap bahwa lingkungan kerja yang bagus dan anggota yang berkualitas sangat penting, sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama 44 dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar.

Kebijakan optimalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah merupakan langkah kebijakan yang memiliki peranan dan implikasi penting dalam memenuhi kebutuhan terwujudnya program pendidikan di sekolah yang sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dihasilkan alternatif-alternatif strategi beserta aktivitas pendekatannya, sehingga peran komite sekolah di MAN 1 Kota Lubuklinggau semakin maksimal yang meliputi:

1. Penyusunan regulasi tentang Komite Sekolah yang mengakomodir : a. Kebutuhan akan adanya jaminan dan perlindungan hak dan kewajiban Komite sekolah; b. Sekolah dalam melaksanakan tupoksi-nya sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan; c. Kewenangan dan urusan dalam penanganan dan pengelolaan keuangan; d. Kewenangan dalam peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Sekolah; dan e. Formulasi standar AD/ART Komite sekolah.
2. Redefinisi Kemitraan antara Komite Sekolah dan Sekolah Perumusan bentuk kemitraan Komite Sekolah dengan Sekolah yang diusulkan adalah berbentuk kerjasama Komite Sekolah dan Sekolah dengan kesetaraan hanya pada sisi tugas dan fungsinya sesuai yang disepakati dalam regulasi/peraturan yang mengikat, sedangkan dari sisi

kedudukan kerjasama tetap pihak Sekolah (Kepala Sekolah) berada pada posisi pemimpin.

3. Penataan Kelembagaan Komite Sekolah Model kelembagaan Komite Sekolah yang diusulkan adalah suatu bentuk kelembagaan fungsional yang lebih menitik beratkan pada pelayanan fungsi administrasi dan keuangan, mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sesuai dengan program Sekolah yang telah disusun dan ditetapkan.
4. Kebijakan Rekrutmen Anggota Komite Sekolah Penetapan kriteria calon anggota Komite Sekolah, antara lain :
 - a. Memiliki kepeduliandan dadikasi yang tinggi akan keberlangsungan program dan kemajuan sekolah;
 - b. Alumni atau orang tua murid yang memiliki ikatan premodial terhadap sekolah, memiliki track record yang baik dan aktif serta sense belonging yang tinggi;
 - c. Memiliki waktu yang cukup;
 - d. Memiliki kapabilitas/kemampuan yang memadai.

Sebelum lahirnya kebijakan dari komite sekolah, sebelumnya panitia mempersiapkan pembentukan stuktur komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang komite sekolah
2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan masyarakat.
3. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat
4. Mengumumkan calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat
5. Menyusun nama-nama anggota terpilih
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada satuan pendidikan
8. Menetapkan nama pengurus yang terpilih sebagai ketua komite sekolah, sekretaris komite sekolah, bendahara komite dan anggota komite sekolah yang telah ditetapkan.
9. Menjalankan tugas dan peraturan yang telah disepakati berdasarkan musyawarah dari semua pihak.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program kerja komite sekolah di MAN 1 Lubuklinggau telah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran komite sekolah dan peran serta aktif komite sekolah dalam penyelenggaraan program kerja sekolah.
2. Faktor pendukung pelaksanaan program komite sekolah di MAN 1 Lubuklinggau meliputi: (a) adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu sekolah; (b) dukungan dana, ide, tenaga dan fasilitas yang memadai; (c) terjalinnya komunikasi yang baik; (d) koordinasi yang baik; (e) latar belakang pendidikan anggota komite sekolah; dan (f) kepala sekolah yang selalu proaktif. Faktor

- penghambat pelaksanaan program komite sekolah di MAN 1 Lubuklinggau adalah: (a) faktor kesibukkan pengurus komite sekolah, dan (b) jadwal/waktu pertemuan yang terbatas.
3. Secara umum kinerja komite sekolah berdampak positif terhadap terhadap mutu pendidikan di MAN 1 Lubuklinggau. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan materil maupun non materil dalam berbagai program peningkatan mutu sekolah.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rnika Cipta.
- Bedjo Sujanto. 2007. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi*, Jakarta: Sagung Seto.
- E.Mulyassa, *Menjadi kepala sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1007) hlm.103.
- Fatchan, 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Malang: Jengala pustaka Utama.
- Faisal S. 1990. *Penelitian kualitatif, dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3).
- <https://www.scribd.com/doc/142306481/bukukerjakepalasekolahkecil>. Kementerian Pendidikan Nasional, “*Buku Kepala Sekolah*” pdf diakses pada 25 Mei 2018.
- <https://nafilaturrohmah.wordpress.com/2013/05/30/Nafilaturrohmah>, *Apa Tujuan Manajemen-berbasis-sekolah-mbs/* diakses pada 25 Mei 2018.
- <http://kepri.kemenag.go.id/file/file/peraturanlainya/thug141983558.pdf>. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007, “*Standar Kepala Sekolah/Madrasah*” diakses 25 Mei 2018.
- Jamal Ma’Mur, 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah* (Wonosari: Diva Press Anggota IKAPI)
- Jalal Fasli dan Dedi Supardi, 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adi Cita).
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyono, 2009. *Manajemen Administrasi dan Organisasi pendidikan*, Jogjakarta: AR-Ruzz Media.
- Nanang Fattah, 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, Cet. 1.
- Oemar Hamalik, 1990. *Evaluasi kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya).